

# **MODEL INTEGRASI PENTAHELIX DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEAMANAN NON TRADISIONAL DI WILAYAH PERBATASAN**

## ***PENTAHELIX INTEGRATION MODEL IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE FACE OF NON-TRADITIONAL SECURITY THREATS IN THE BORDER REGION***

### **Rendi Prayuda**

Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nst No. 113, Kec. Bukit Raya,  
Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia, 28753

**Email:** rendiprayuda@soc.uir.ac.id

### **Fitrisia Munir**

Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nst No. 113, Kec. Bukit Raya,  
Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia, 28753

**Email:** Fitrisiamunir@soc.uir.ac.id

### **Rio Sundari**

Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nst No. 113, Kec. Bukit Raya,  
Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia, 28753

**Email:** Riosundari@soc.uir.ac.id

### **Abstrak**

Kajian perbatasan merupakan salah satu kajian yang sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Permasalahan di wilayah perbatasan Indonesia baik perbatasan darat, laut dan udara dengan negara tetangga bukan hanya tentang bagaimana menjaga keutuhan wilayah dan keamanan di seluruh wilayah perbatasan akan tetapi juga tentang upaya merawat dan memberdayakan potensi di wilayah perbatasan Indonesia. Pembangunan, pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan dapat dikatakan belum optimal, kondisi ini menimbulkan ancaman tradisional yang bersifat nonmiliter dalam dan pada akhirnya mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan di Provinsi Riau. Berdasarkan kajian literatur, ancaman keamanan nonmiliter disebabkan oleh aspek internal dan eksternal masyarakat perbatasan yang mengalami kesenjangan ekonomi dan pengetahuan serta peran dari berbagai stakeholder. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis Model Integrasi Pentahelix terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non Tradisional di Wilayah Perbatasan Provinsi Riau. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik analisis library research (studi kepustakaan) dengan analisis berbagai sumber seperti Buku, Jurnal, dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan sekaligus pengamanan wilayah perbatasan perlu dilakukan guna mengatasi kesenjangan sosial masyarakat dan mengatasi ancaman keamanan non tradisional dengan membentuk sistem pertahanan nirmiliter. Sistem pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan berupa integrasi kelembagaan Pentahelix yang mampu membantu tidak hanya keamanan wilayah akan tetapi juga memberikan bantuan fasilitasi dan advokasi dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dari hasil kebijakan kolaborasi Pentahelix dalam meningkatkan kemandirian dan pemahaman kepada masyarakat terkait besarnya ancaman keamanan nonmiliter terhadap sumber daya di wilayah perbatasan.

**Kata Kunci:** perbatasan, keamanan non tradisional, integrasi pentahelix, pemberdayaan masyarakat.

## **Abstract**

*Border study is one of the most important studies in the development of a country. Problems in Indonesia's border areas, including land, sea and air borders with neighboring countries, are not only about how to maintain territorial integrity and security in all border areas, but also about efforts to maintain and empower potential in Indonesia's border areas. Development, supervision and security in the border area can be said to be not optimal, this condition poses a traditional threat that is non-military in nature and ultimately interferes with the security and welfare of border communities in Riau Province. Based on the literature review, non-military security threats are caused by internal and external aspects of border communities that experience economic and knowledge gaps and roles from various stakeholders. This study aims to analyze Pentahelix integration model related to community empowerment in dealing with non-traditional security threats in Riau province border region. This study uses qualitative research methods based on library research analysis techniques (literature studies) with analysis of various sources such as Books, Journals, and articles. The results showed that the development and security of border areas needed to be done to overcome the social saturation of the community and overcome non-traditional security threats by establishing a nonmilitary defense system. Nonmilitary defense system in the border region in the form of Pentahelix institutional integration is able to help not only the security of the region but also provide facilitation and advocacy assistance in community empowerment. Community empowerment is a strategy from the results of Pentahelix collaboration policy in increasing independence and understanding to the community regarding the magnitude of non-military security threats to resources in the border region.*

**Keywords:** border, non-traditional security, pentahelix integration, community empowerment.

## **PENDAHULUAN**

Dinamika konstelasi politik internasional pasca perang dingin telah mengubah polarisasi hubungan antar negara dalam arena politik internasional dari yang mengutamakan isu keamanan negara (*security*) menjadi ke arah isu low politics seperti isu ekonomi, sosial dan budaya. Kondisi sosial masyarakat saat ini menurut Alfajri et al., (2019) telah dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni; euforia otonomi daerah, euforia reformasi, pemahaman demokrasi yang keliru dari masyarakat, heterogenitas masyarakat dalam agama, ras, suku dan golongan. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber konflik yang berujung pada tindakan anarkis.

Berdasarkan Hikam & Praditya, (2018) kemungkinan masalah yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat tidak bersumber dari kekerasan fisik yang bersifat militer, akan tetapi permasalahan bersifat nonmiliter. Ancaman, Tantangan, Hambatan

dan Gangguan pada masa yang akan datang dianggap menjadi ancaman non konvensional (non-militer). Paradigma pertahanan Indonesia yang selama ini hanya mengandalkan TNI sebagai kekuatan utama dalam menjaga pertahanan, harus diubah. Menurut The Stanley Foundation, (2003) Ancaman nonmiliter merupakan ancaman yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun ancaman ini ada dengan nyata dan mengancam kesatuan dan persatuan baik negara maupun masyarakat. Ancaman nonmiliter dapat terjadi dalam ranah politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, keamanan sosial dan penegakan hukum. Keseluruhan aspek tersebut merupakan dimensi dalam pembangunan negara terlebih khususnya pada sebuah daerah. Dinamika dan isu tersebut seringkali terjadi tidak terkecuali di daerah terluar wilayah Indonesia yakni wilayah perbatasan.

Rentannya keamanan di wilayah perbatasan menyebabkan salah satu indikator

terjadinya permasalahan yang bukan hanya mencakup aspek teritorialitas dan politik melainkan juga aspek ekonomi, sosial dan budaya. Menurut penelitian Haris Zulkarnain & Roisah, (2018) Pengelolaan perbatasan menjadi salah satu karakteristik kuat atau lemahnya suatu negara. Pengelolaan perbatasan yang efektif merupakan prasyarat untuk menciptakan negara yang kuat dan berdaulat. Permasalahan yang selama ini terjadi dan dihadapi di daerah perbatasan yaitu: *Illegal logging, Illegal fishing, Perdagangan manusia (Human Trafficking), Penyelundupan sumber daya hingga narkoba.* Kegiatan ini bukan hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi negara, dan melemahkan kedaulatan suatu negara. Sebagai beranda depan, wajah wilayah perbatasan harus mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Akan tetapi, fenomena yang ada masyarakat di wilayah perbatasan seringkali dianggap miskin dan berorientasi pada negara tetangga. Wilayah perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan negara, tidak hanya memberikan kepastian hukum kedaulatan internal dalam pengelolaan administrasi pemerintahan melainkan juga memberikan kedaulatan eksternal berkaitan melakukan relasi dan menjaga dari ancaman yang masuk.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Paradigma pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang berorientasi *inward looking*, menjadi *outward looking*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang dikombinasikan dengan pendekatan keamanan (*security approach*), dengan tidak meninggalkan aspek lingkungan

(*environment*) tetap menjaga kedaulatan (*sovereignty*) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pengelolaan wilayah perbatasan negara, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) telah merumuskan 4 (empat) isu strategis pengelolaan perbatasan antar negara, yaitu isu: (1) pengelolaan batas wilayah negara (*boundary/border line issues*), (2) pengelolaan lintas batas (*cross-border issues*), (3) pembangunan kawasan perbatasan (*frontier issues*), dan (4) kelembagaan (*institutional issues*).

Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 01°05'00" Lintang Selatan - 02°25'00" Lintang Utara dan antara 100°00'00" Bujur Timur hingga 105°05'00" Bujur Timur, yang membentang dari lereng bukit barisan hingga Selat Malaka Provinsi Riau secara geografis berbatasan dengan Provinsi lain dan Negara Tetangga sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka; sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat; sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis tersebut adalah berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, dekat dengan Malaysia, Singapura, selain itu berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Sementara itu, Negara Kepulauan Republik Indonesia yang berbatasan dengan

10 negara memiliki 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memerlukan penanganan khusus. Diantara PPKT tersebut terdapat 10 PPKT yang menjadi prioritas penanganan. Secara administrasi PPKT tersebut terdapat di 13 provinsi, di 41 kabupaten/kota dan di 187 kecamatan yang menjadi Lokasi Strategis (Lokpri). 10 diantara Lokpri-Lokpri tersebut terdapat di enam kabupaten dan kota di Provinsi Riau (Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan. Prioritas penanganan secara khusus direncanakan secara simultan dan bertahap mulai dari Tahun 2015 sampai dengan 2019.

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki luas geografis sekitar 329.867,61 km<sup>2</sup> yang membentang dari pantai timur tengah sumatra hingga ke pesisir barat Kalimantan. Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau Berada pada Posisi strategis secara geopolitik dan ekonomi yang berada pada jalur perdagangan internasional selat malaka serta kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi di tiga (3) negara yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand. Provinsi Riau menjadi lokus penelitian dalam mengidentifikasi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan serta meningkatkan pemahaman masyarakat perbatasan akan potensi yang ada di wilayah perbatasan melalui pemberdayaan.

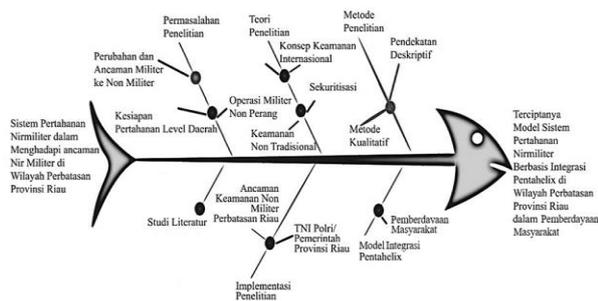
Penelitian terhadap keamanan negara di wilayah perbatasan sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terutama mengenai keamanan wilayah berdasarkan pertahanan maritim di wilayah perbatasan. Akan tetapi, penelitian mengenai sistem pertahanan nirmiliter melalui model integrasi Pentahelix dalam rangka pembangunan sosial masyarakat dan pemberdayaan di wilayah perbatasan masih belum banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Hingga saat ini, penelitian mengenai konsep

keamanan baik militer dan non-militer masih sekedar bentuk ancaman dan sistem pertahanan negara semata. Seperti kajian yang dilakukan oleh Swanstrom (2010) mengenai ancaman keamanan non negara menjelaskan bahwa dibutuhkan analisis yang mendalam terhadap perbandingan antara ancaman yang bersifat keras (fisik) dan lunak (non-fisik) serta berbagai keamanan di nagara asia yang bersifat multidimensional akibat lemahnya struktur pemerintah dan negara.

Selanjutnya penelitian oleh Rusfiana & Madjid (2017) mengenai “Synergy Of Local Government And Indonesian National Army In Estabilishing State Border Area”. Penelitian ini menjelaskan banyak kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan keamanan diwilayah perbatasan, akan tetapi permasalahan yang signifikan justru timbul akibat adanya ketimpangan sosial budaya dan ekonomi di wilayah perbatasan. Oleh karena itu penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan membutuhkan sinergitas kerjasama antara stakeholder khususnya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pada akhirnya akan meningkatkan sinergi pembangunan di kawasan perbatasan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (Rusfiana & Madjid, 2017)

Kemudian, penelitian menangani strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan wilayah perbatasan menurut perspektif sosial pembangunan oleh Rani (2017) (Rani, 2017) menjelaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki peran dalam menentukan batas kedaultan. Penelitian ini menjelaskan lingkup keamanan tidak hanya terbatas pada substansi wilayah tetapi menjadi isu yang spesifik seperti *people freedom*, kesejahteraan, sosial ekonomi dan perlindungan masyarakat. Bentuk implementasinya, diperlukan kapasitas

dan pemberdayaan sumber daya manusia dari stakeholder dan masyarakat itu sendiri.



**Gambar 1.** Kerangka Dasar Penelitian

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2022*

Data pada gambar 1 menunjukkan kerangka dasar penelitian mengenai analisis konsep dan teori yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi model integrasi Pentahelix terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi isu-isu dan ancaman keamanan non-tradisional di wilayah perbatasan. Penelitian mengenai model pengembangan sistem pertahanan nirmiliter yang berbasis integrasi Pentahelix dalam menghadapi ancaman keamanan non-militer di wilayah Perbatasan Provinsi Riau dilakukan dengan metode penelitian studi kepustakaan. Alasan penulis menggunakan metode berdasarkan analisis studi pustaka adalah untuk menemukan masalah untuk diteliti, membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu dan mencari gap atau kesenjangan terkait keamanan dan kerentanan wilayah perbatasan yang saat ini tidak lagi konvensional. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapat informasi yang relevan dengan teknik pengumpulan data secara sekunder berdasarkan jurnal ilmiah, buku, *research desktop* dan artikel yang mendukung penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif artinya penarikan kesimpulan penelitian dilakukan dari hal yang bersifat khusus ke umum. Selain itu analisis data juga dilakukan

bersamaan dengan proses pengamatan dan pengumpulan data. Jadi, selama proses penelitian berlangsung, data yang diperoleh dapat langsung dianalisis. Melalui teknik ini, digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori dan hasil studi literatur dengan upaya untuk menjawab masalah berupa:

- 1) Apa saja bentuk-bentuk ancaman keamanan nonmiliter di wilayah perbatasan Provinsi Riau?
- 2) Bagaimana Pengembangan Sistem Pertahanan nirmiliter di Provinsi Riau?
- 3) Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui model integrasi Pentahelix dalam menghadapi ancaman keamanan nonmiliter di wilayah perbatasan Provinsi Riau?

## PEMBAHASAN

### Bentuk Ancaman Keamanan Non-Militer di Wilayah Perbatasan Provinsi Riau

Penelitian oleh Rani (2017) menyebutkan bahwa ancaman keamanan terhadap wilayah perbatasan secara konvensional atau nonmiliter muncul sebagai akibat adanya kesenjangan kesejahteraan masyarakat di perbatasan yang pada akhirnya memicu timbulnya kegiatan ilegal di sekitar perbatasan. Masih rentanya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran terhadap hasil kekayaan alam Indonesia di Provinsi Riau yang di ekspor menuju negara tetangga seperti Malaysia seperti kegiatan *illegal fishing* dan *illegal logging*. Sebagai kawasan strategis yang letaknya berada diantara perairan selat Malaka yang merupakan kawasan perlintasan perdagangan internasional membuat Provinsi Riau dijadikan salah satu rute penyelundupan narkoba. Selain itu, ancaman keamanan

nonmiliter lain yang marak terjadi di perbatasan Provinsi Riau adalah praktik tenaga kerja ilegal, penyelundupan sumber daya alam, perdagangan manusia, dan perdagangan senjata api ilegal (Nama belakang penulis, tahun).

*Illegal Logging* diartikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan, tindakan ini merupakan pelanggaran peraturan kehutanan dan menjadi sebutah tindak kejahatan yang mencakup penebangan kayu di area konservasi, wilayah yang dilindungi dan taman nasional Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dianggap kejahatan kehutanan dengan kata lain defenisi *illegal logging* adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan berdasarkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Tindak kejahatan ini tidak mengindahkan kaidah manajemen pelestarian sumber daya perbatasan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga akan menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aspek. Sumber daya hutan yang ada di kawasan perbatasan menjadi rusak akibat penebangan liar dengan jumlah yang sangat besar. Kerugian yang ditimbulkan memiliki dimensi yang luas tidak hanya pada masalah ekonomi semata, melainkan masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan. Ancaman nyata (*existential threat*) yang bersifat transnasional dan non-militer dapat melemahkan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan (Sumber, tahun).

Menurut Izzaty et al., (2015) Wilayah perbatasan provinsi Riau menghadapi beberapa ancaman keamanan yang beragam dalam ancaman nonmiliter tindak kejahatan *illegal logging*, yakni: pertama, berupa ancaman lingkungan dari pencemaran dan kelangsungan sumber daya kehutanan di wilayah perbatasan. Kedua, ancaman terhadap pelanggaran hukum yang berasal dari pelanggaran hukum dari tindakan pencurian kayu di wilayah perbatasan Provinsi Riau yang nantinya akan

diselundupkan ke Malaysia. Sektor keamanan lingkungan indonesia melibatkan berbagai macam aktor dan stakeholder yang terikat satu sama lain. Persoalan illegal logging yang terjadi di kawasan Provinsi Riau ini menunjukkan adanya *cross-sectoral security connectionse* (keterhubungan antara sektor keamanan) berupa relasi politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan militer yang memiliki tingkat sekuritisasi yang tinggi serta memainkan peran penting.

Selanjutnya illegal fishing, wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis dan potensi sumber daya perikanan yang besar tentunya menarik perhatian kapal-kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan memasuki perairan laut Indonesia secara ilegal pula. Salah satu faktor terjadinya illegal fishing ialah kebutuhan (*demand*) dari ikan didunia terus meningkat, dilain sisi pasokan ikan menurun sehingga mengakibatkan kelebihan permintaan (*overdemand*)Berbagai modus operandi nelayan asing masuk dan mencuri ikan di perairan perbatasan dan kemudian diperjual belikan di negaranya dengan harga yang tinggi. *Illegal fishing* tersebut tentunya memberikan dampak kerugian bagi Indonesia karena menurunkan produktivitas secara signifikan serta mengancam sumber daya laut yang ada di Indonesia. Hal ini juga mengancam terutama bagi masyarakat perbatasan yang 60% masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Bukan hanya kerugian secara ekonomi melainkan juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara karena melanggar kedaulatan dan berkenaan dengan keamanan suatu negara dan masyarakat.

*Human Trafficking*, merupakan bentuk kejahatan yang beresiko rendah namun memiliki keuntungan yang besar. *Human Trafficking* adalah perdagangan manusia yang saat ini menjadi suatu keprihatinan dunia internasional mengingat sejumlah pelanggaran terhadap hak

asasi manusia karena korban tidak lagi diperlakukan seperti manusia melainkan budak dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks Human Trafficking di wilayah perbatasan biasanya melalui jalur yang berkedok memberikan pekerjaan yang layak. Masyarakat perbatasan tidak memiliki pendidikan yang layak, rata-rata berasal dari keluarga kurang mampu sehingga seringkali tidak memiliki posisi tawar dan terpaksa harus menuruti ajakan karena modus pekerjaan.

Ancaman ekonomi terhadap wilayah perbatasan Provinsi Riau pada dasarnya muncul akibat tidak meratanya pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian masyarakat di perbatasan yang kemudian mengakibatkan rendahnya angka kesejahteraan masyarakat. Masih tingginya angka kemiskinan dan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan Provinsi Riau sehingga memberikan ancaman ekonomi masyarakat di perbatasan Provinsi Riau. Sebagai Provinsi yang memiliki kawasan strategis karena berdekatan dengan Negara Malaysia seharusnya membuat Provinsi Riau memiliki perekonomian yang baik, namun karena masih minimnya pembangunan akses transportasi sehingga membuat mobilisasi antar daerah menjadi terganggu. Pada umumnya terdapat tiga (3) permasalahan yang menjadi faktor pemicu ancaman ekonomi di kawasan perbatasan, yaitu: Kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, Masih tingginya angka kemiskinan, dan Masyarakat perbatasan yang pada umumnya terisolasi karena masih rendahnya aksesibilitas mode transportasi.

Menurut Gregory Mankiw (2003) yang dimaksud dengan infrastruktur adalah perwujudan dari modal publik (*public capital*) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari investasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Belum meratanya

pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya di wilayah perbatasan sangat mengganggu perekonomian masyarakat, hal ini tidak terlepas dari terhambatnya akses mobilitas barang antar daerah akibat dari minimnya infrastruktur pendukung. Lambatnya pembangunan infrastruktur ini masih belum mencerminkan cita-cita untuk memberikan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, minimnya infrastruktur di perbatasan membuat Pemerintah belum mampu menjamin kesejahteraan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan dari minimnya infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat perbatasan ini tentu berdampak langsung bagi kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat yang ada di kawasan perbatasan. Ancaman ekonomi dari minimnya infrastruktur ini dianggap sebagai ancaman nyata (*existential threat*) yang bersifat transnasional dan nonmiliter yang dapat melemahkan kedaulatan Negara yang diakibatkan oleh rendahnya kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

Menurut Kessides (1993) terdapat dua (2) dampak yang diberikan dengan adanya pembangunan infrastruktur bagi suatu wilayah, yaitu: Infrastruktur memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi karena memberikan dampak pada pengurangan biaya dalam produksi, dan Infrastruktur memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan menurut Sari dan Rahman (2019) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur bagi kawasan perbatasan dapat membantu pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan ekonomi masyarakat perbatasan dan memberikan kemudahan akses. Wilayah perbatasan Provinsi Riau menghadapi satu permasalahan utama dalam pemenuhan infrastruktur untuk bidang ekonomi, pembangunan akses jalan di Provinsi Riau belum sepenuhnya menjangkau daerah yang berada di kawasan perbatasan. Masih

terdapat beberapa lokasi yang memiliki akses jalan belum memenuhi standar keselamatan sehingga sangat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.

Permasalahan selanjutnya adalah masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Riau, menurut Bappenas (2004) yang dimaksud dengan kemiskinan adalah kondisi dimasa seorang individu hingga kelompok tidak mampu untuk memenuhi hak-hak untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut informasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau per bulan Maret 2021 setidaknya terdapat 500,81 ribu jiwa masyarakat yang hidup dibawah angka kemiskinan di Provinsi Riau. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Riau, diantaranya: 1) Perkonomian Provinsi Riau yang tumbuh melambat. 2) Terdapat penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga. 3) Naiknya beberapa harga eceran barang komoditas pokok di Provinsi Riau. 4) Tingginya angka pengangguran terbuka di Provinsi Riau. 5) Kurangnya lapangan pekerjaan di Provinsi Riau (Sumber, tahun).

Melemahnya perekonomian masyarakat menjadi sebuah ancaman nyata bagi sektor-sektor lainnya seperti sektor keamanan, politik, dan lingkungan. Ketika masalah kemiskinan ini tidak dapat segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi Riau maka secara tidak langsung akan berdampak bagi kedaulatan wilayah terkhusus wilayah perbatasan. Program pemberdayaan masyarakat miskin di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau harus lebih diperbanyak, terkhusus pemberdayaan di wilayah perbatasan harus lebih difokuskan pada pembenahan sumber daya manusianya.

Permasalahan selanjutnya adalah masih terisolirnya masyarakat perbatasan, faktor letak

geografis menentukan permasalahan yang satu ini. Terdapatnya beberapa wilayah yang masuk zona perbatasan Negara di Provinsi Riau membuat sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mengakses pusat Kecamatan hingga Kabupaten/Kota. Permasalahan yang umumnya sering terjadi adalah tidak adanya akses transportasi yang bisa masyarakat gunakan, karena masyarakat di pebatasan rata-rata merupakan dari kalangan warga miskin sehingga tidak memiliki cukup uang untuk membeli bahkan menyewa alat transportasi .

Ancaman ideologi dipahami sebagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional di suatu Negara dengan memberikan pengaruh pemikiran individu seperti perang ideologi menggunakan paham yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Ancaman ideologi terhadap masyarakat di Kawasan perbatasan pada dasarnya muncul akibat kuatnya akses informasi yang diterima oleh masyarakat di perbatasan yang berasal dari Negara tetangga. Kawasan perbatasan sangat mudah untuk mendapatakn ancaman ideologi dari Negara lain, hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap akses keluar masuk di beberapa daerah perbatasan sehingga aliran-aliran yang bertentangan denga pancasila dapat dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Sebagaimana penelitian Rahayu & Junior (2021) Lemahnya akses Pemerintah untuk menjangkau daerah perbatasan ternyata dapat berimplikasi pada gangguan aspek pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan Negara. Di beberapa wilayah perbatasan yang ada di Provinsi Riau masih lebih mudah mendapatkan akses informasi dari negara lain, contohnya dari siaran televisi negara tetangga yang justru lebih mudah di dapatkan dari pada siaran televisi nasional. Masyarakat wilayah perbatasan masih lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan politik dari negara

tetangga, dengan kemudahan akses untuk menjangkau negara tetangga membuat masyarakat perbatasan banyak memilih untuk bekerja dan menetap di negara tersebut. Aktivitas masyarakat perbatasan seperti ini yang kemudian ditakutkan membawa aliran ideologi baru masuk ke Provinsi Riau sehingga penting dilakukan pengawasan yang ketat terhadap aliran-aliran baru yang berkembang ditengah masyarakat agar dapat mencegah perubahan ideologi yang dapat mengancam keamanan negara.

Daerah perbatasan yang kurang diperhatikan menurut Sabaat (2017) setidaknya menimbulkan degradasi nasionalisme. Terlebih akibat buruknya kesejahteraan dan infrastruktur di wilayah perbatasan menyebabkan banyak masyarakat yang memiliki kedekatan interaksi sosial ekonomi dan emosional dengan masyarakat perbatasan negara tetangga. Secara krusial, ancaman yang harus dihadapi oleh masyarakat perbatasan di Provinsi Riau adalah terbagi tiga (3) yaitu: Ancaman Keamanan, Ancaman Ekonomi dan Ancaman Ideologi.

1. Ancaman Keamanan: bentuk ancaman keamanan yang dihadapi oleh masyarakat Provinsi Riau adalah kejahatan penyelundupan narkoba. Sebagai wilayah yang dilewati oleh perairan Selat Malaka telah membuat Provinsi Riau sebagai salah satu gerbang pintu masuk kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di Indonesia, penyelundupan narkoba ke Provinsi Riau melalui jalur perairan (laut) dari Negara Malaysia.
2. Ancaman Ekonomi: Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Riau menjadi ancaman nyata dalam sektor ekonomi. Salah satu contoh wilayah perbatasan di Provinsi Riau yang mengalami permasalahan kesejahteraan masyarakat ialah Kabupaten Kepulauan

Meranti, dimana Kabupaten ini menjadi salah satu kabupaten dengan nilai indek pembangunan manusia terendah di Provinsi Riau. Dengan letak geografis yang tidak jauh dari Negara Malaysia tentunya memberikan ancaman bagi Negara Indonesia apabila masalah kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak segera diselesaikan.

3. Ancaman Ideologi: Bentuk ancaman ideologi yang dikhawatirkan berkembang di Provinsi Riau adalah munculnya aliran-aliran baru dari Negara tetangga dalam bentuk politik, ekonomi, dan sosial budaya yang justru bertentangan dengan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila.

Fenomena masalah yang menyebabkan kerawanan wilayah perbatasan Provinsi Riau mengalami ancaman nonmiliter adalah:

1. Orientasi pembangunan yang seringkali hanya berfokus pada center-oriented development, dengan asumsi akan terjadi *trickle down effect* ke wilayah sekitar, sementara wilayah terluar dipandang sebagai wilayah yang termarginalisasi dan tidak potensial untuk dijadikan kegiatan baik ekonomi dan peningkatan sosial budaya.
2. Wilayah perbatasan tidak dijadikan sebagai sumber potensi ekonomi yang optimal. Hal ini menjadi persoalan bagi wilayah yang secara geografis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Philipina. Wilayah perbatasan seringkali memiliki kendala kurangnya akses terhadap transportasi dan pasar karena letaknya yang sangat jauh dari pusat. Menurut Andayani & Lidia (2018), situasi ini tentunya akan memberikan kerugian yang signifikan bagi negara terutama dalam pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan itu sendiri (nama belakang penulis, tahun). Secara ekonomi, masyarakat dari negara tetangga mengalami keuntungan yang lebih dari hasil perdagangan perbatasan yang cenderung informal dan ilegal. Sementara, komoditas lokal dibeli dengan harga yang murah dan dijual dengan harga tinggi di negara mereka serta umumnya transaksi perdagangan dilakukan dengan mempergunakan mata uang negara tetangga.

3. Batas fisik wilayah perbatasan sangat memprihatinkan karena banyak patok batas yang hilang.
4. Infrastruktur di kawasan perbatasan relatif masih terbatas dan perlu penanganan yang serius terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, perhubungan, pemukiman dan informasi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir seringkali mengalami ketergantungan terhadap negara lain.
5. Sumber daya di wilayah perbatasan dikategorikan sebagai kawasan konservasi dan memiliki kandungan keragaman hayati yang tinggi, namun hal ini sering dijadikan sebagai kegiatan penyelundupan ilegal dan *illegal fishing*.

Permasalahan ini tidak berhenti pada satu titik permasalahan saja, karena hal ini berkembang menjadi persoalan kualitas partisipasi sosial dan politik masyarakat perbatasan. Sebagaimana disebutkan oleh Lengkong et al., (2018) pada esensinya apapun kebijakan yang dibuat pemerintah tidak akan dapat berjalan efektif jika tidak direspon aktif oleh masyarakat. Kondisi ini menjadi masuk akal bagi masyarakat perbatasan, karena masyarakat melihat bahwa kebutuhan hidup akan lebih terpenuhi oleh aktivitas ekonomi di wilayah luar, maka masyarakat akan cenderung

tidak responsif terhadap kebijakan pemerintah wilayahnya sendiri karena dinilai oleh masyarakat belum mampu menjawab permasalahan sekaligus kebutuhan di wilayah perbatasan. Penjelasan tersebut cukup membuktikan bahwa sebenarnya dalam meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan terutama dalam mengatasi ancaman non-militer tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah semata, melainkan harus adanya sinergitas komponen lain sebagai pendukungnya.

Menurut Siregar et al., (2019) Upaya dalam membangun pertahanan negara telah diatur melalui berbagai peraturan secara legal. Namun, pembangunan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer belum tersinergi dengan jelas dan baik. Terutama dalam aspek keamanan manusia berupa masyarakat yang menetap disuatu negara. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka pertahanan negara dalam sisi nonmiliter menjadi lemah. Oleh karena itu, untuk menghadapi jenis ancaman keamanan nonmiliter dibutuhkan suatu kekuatan non-fisik sebagai kekuatan nirmiliter yang didasarkan pada penguasaan IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi) yang harus menjadi kesadaran dalam membela dan mempertahankan eksistensi negara sesuai dengan peran dan profesi warga negara.

Solusi dalam memperkuat pertahanan kawasan perbatasan khususnya di Provinsi Riau dapat dilakukan dengan sistem pertahanan nirmiliter dengan menggunakan aspek kelembagaan yaitu model integrasi Pentahelix dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan. Sistem pertahanan nirmiliter merupakan sistem pertahanan yang tidak menjadikan unsur TNI sebagai komponen utama, melainkan menempatkan Kementrian Lembaga diluar bidang pengembangan sistem pertahanan nirmiliter dengan konsep integrasi Pentahelix

yang menggabungkan unsur pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi dan media massa. kolaborasi model Pentahelix diharapkan dapat menjadi sebuah model pertahanan ampuh langsung berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura serta berada pada jalur strategi perdagangan internasional Selat Malaka yang memiliki kerawanan cukup tinggi dalam aspek penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia dan radikalisme (Syafira & Fatima, 2021).

### **Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Perbatasan**

Menurut Islamy Izzul (2019) Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat semata, tetapi juga prantara-prantaranya dengan cara menanamkan nilai dan norma. Dalam membangun sistem pertahanan harus melibatkan masyarakat sebagai komponen non-militer didalamnya. Pembangunan karakter masyarakat harus diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara setiap warga negara Indonesia khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan guna menyiapkan diri menghadapi ancaman-ancaman nirmiliter yang sering kali mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Hadiyanti (2008) Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris "*empowerment*" yang memiliki arti sebagai pemberkuasaan. Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana komunitas, masyarakat atau rakyat diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan juga diartikan sebagai proses yang berjalan terus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya. Upaya tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara memperbaiki asumsi dasar bahwa setiap manusia memiliki potensi dan daya.

Menurut penelitian oleh Lesnussa (2019) Pemberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan dari seseorang dalam masyarakat guna memperkuat *community self-reliance* atau kemandirian. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan dalam mengembangkan diri demi mencapai kemajuan dalam ketahanan nasional. Pemberdayaan Masyarakat merupakan segenap upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya pada aspek sumber daya dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas ekonomi dan kompetensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan swadaya.

Dalam proses Pemberdayaan, masyarakat harus didampingi dalam membuat analisis atau peta masalah yang dihadapi, hal tersebut bertujuan untuk menemukan alternatif solusi dari masalah serta mencari strategi dalam memanfaatkan potensi berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Menurut Margayaningsih (2018) realisasi pemberdayaan masyarakat merupakan dasar dalam meningkatkan kualitas dari masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan harus melibatkan pemerintah sepenuhnya dalam membangun relasi kerjasama dengan masyarakat di wilayah perbatasan.

Berdasarkan proses mengoptimalkan sumberdaya di perbatasan menurut Hamid (2018) pendekatan yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat yang menepatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan motivator dalam pembangunan. Selain itu, perlu adanya pendampingan kepada masyarakat oleh stakeholder lainnya bagi kelompok masyarakat dengan berbagai kegiatan dan kebijakan. Bentuk pendampingan berupa mediasi, fasilitasi dan advokasi. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi

pengambilan keputusan dalam berlandaskan kepentingan publik untuk kemajuan individu atau kelompok yang ingin diberdayakan.

### **Sistem Pertahanan Nirmiliter: Model Integrasi Pentahelix**

Sistem Pertahanan Nirmiliter adalah perangkat unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu integritas. Sistem dapat diartikan sebagai kesatuan bagian yang saling berhubungan serta memiliki komponen penggerak. Inti dari Pertahanan nirmiliter merupakan pertahanan yang bersifat nonfisik tanpa penggunaan senjata akan tetapi dilakukan dengan cara memberdayakan faktor ekologi, ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya dan teknologi melalui pengetahuan, keahlian, profesi dan kecerdasan guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil. Sistem pertahanan nirmiliter juga dapat diwujudkan melalui peran dan fungsi dari lembaga pemerintah non departemen di luar bidang pertahanan guna terselenggaranya kesejahteraan pembangunan nasional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan isu atau ancaman nirmiliter yang terjadi guna mencapai hasil yang maksimal.

Dalam memperkuat sinergitas penanganan ancaman nirmiliter, sebagaimana menurut Alfajri et al., (2019) memberikan kerangka sekuritisasi berdasarkan syarat yang harus dipenuhi oleh para *stakeholder* dalam mewujudkan suatu sinergitas yang komprehensif. Terdapat enam (6) indikator yang mendorong sistem pertahanan nirmiliter berdasarkan analisis tata kelola pemerintahan, perencanaan berkelanjutan, pembinaan dan pemberdayaan. Indikator tersebut antara lain:

- 1) Revitalisasi sentralitas peran negara (pemerintahan) dan institusi Perbatasan dalam menghadapi ancaman nonmiliter.
- 2) *Good Governance*, sebagai penggerak penyelenggaraan Tata Ruang Pertahanan

Wilayah Pertbatasan dengan pembinaan Aparatur Sipil Negara di daerah.

- 3) Menciptakan sinergitas vertikal-horizotal menghadapi ancaman dengan memberntuk badan pengelola perbatasan yang dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
- 4) Menetapkan penataan wilayah perbatasan yang terintegrasi dan inisiasi digitalisasi.
- 5) Membangun fasilitas edukasi, advokasi dan media massa sebagai instrumen sosial dalam proses sosialisasi, pembangunan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan
- 6) Merencanakan pembangunan wilayah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekstraksi sumber daya dibawah kontrol pemerintah.

Enam indikator tersebut tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan dan implementasi yang terstruktur secara lingkup ruang dan lini waktu. Oleh sebab itu, sebuah kerangka matriks sinergitas peran dan kebijakan publik dalam mendorong strategi pemerintah dalam menghadapi ancaman-ancaman yang bersumber dari kerawanan nonmiliter harus berdasarkan aspek kelembagaan. Kelembagaan merupakan istilah yang mendeskripsikan praktik kelola interaksi sosial. Sebagaimana menurut John W. Mohr & Harrison C. White (2018) Kelembagaan sendiri dapat berupa struktur, sistem partisipasi dan peran masyarakat, nilai dan norma yang ada. Kelembagaan sosial di masyarakat menjadi salah satu kunci kesuksesan suatu program yang tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan. Emerson, Nabatchi & Balogh (2011) berpendapat proses kelembagaan yang dimaksud merupakan kolaborasi berupa (*collaborative governance*) dengan definisi proses *policy making* baik secara publik atau mangement dengan langsung melibatkan masyarakat bersamaan dengan pemerintah,

swasta, media, akademisi, dan sipil untuk kepentingan bersama secara umum. Secara garis besar kolaborasi kelembagaan (*collaborative governance*) dapat disebut dengan Model Integrasi Pentahelix.

**Tabel 1.** Model Integrasi Pentahelix

No	Stakeholder	Penanggung Jawab	Peran
1	Pemerintah (Government)	Pemerintah Daerah	Regulator
2	Bisnis	Kalangan Swasta	Enabler
3	Akademisi	Universitas	Conceptor
4	Media Massa	Media Masa di Daerah	Expender
5	Komunitas	Masyarakat Sipil / Ormas	Accelerator

Sumber: Data olahan penulis, 2021

Dari tabel 1. diatas menunjukkan sinergitas peran dengan Model Integrasi Pentahelix yang terdiri dari beberapa stakeholder dengan tanggung jawabnya masing-masing dalam penanganan ancaman nirmiliter. Sinergitas Model Integrasi Pentahelix tersebut bertujuan untuk memberdayakan otoritas lokal atau daerah untuk menemukan pendekatan inovatif dan efisien dalam pengembangan, pembiayaan, pengimplementasian dan peningkatan rencana aksi yang berkelanjutan. Sinergitas melalui model integrasi Pentahelix ini diharapkan mencapai tujuan strategis baik secara mikro dan makro maupun dalam jangka waktu tertentu (jangka pendek, menengah dan panjang).

### Strategi Pemberdayaan berdasarkan Model Integrasi Pentahelix

Kegagalan pencapaian hasil dalam tata kelola kolaboratif dan kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Fitrianti et al. (2019) dapat dipengaruhi oleh dinamika permasalahan yang meliputi: adanya perbedaan

pemahaman karakter dan pola pikir aktor pelaksana dan masyarakat; kurangnya kemauan moral dan partisipasi politik untuk membangun kesadaran dalam memperkuat moral sosial; adanya budaya politik/ kebiasaan masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah dan menerima bantuan berupa uang dan/atau barang yang menghambat proses pemberdayaan; kewenangan dalam pengambilan keputusan dan alokasi anggaran yang terlalu berjenjang sehingga menghambat proses pelaksanaan pemberdayaan.

Pada esensinya masalah nonmiliter yang terjadi di wilayah perbatasan Provinsi Riau dipicu karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap potensi dan kurangnya kerjasama antar stakeholder dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di wilayah pesisir. Haris Zulkarnain & Roisah (2018) juga menyebutkan bahwa ancaman kemanan nonmiliter seperti perdagangan ilegal di wilayah perbatasan terjadi karena minimnya akses pasar bagi masyarakat, sehingga peran aktor bisnis/swasta juga diperlukan dalam kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan, serta melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan pasar. Haris Zulkarnain & Roisah (2018) menambahkan, dengan kemudahan dalam aksesibilitas, wilayah perbatasan yang merupakan daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) diharapkan akan semakin baik kondisi ekonomi masyarakatnya. Kondisi ekonomi yang baik dalam terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan akan menangkal berbagai bentuk ancaman kemanan nonmiliter di wilayah perbatasan.

Dalam memberdayakan masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Riau, dapat dilakukan dengan model integrasi Pentahelix yang masing-masing aktor/stakeholder memiliki peran sebagai berikut:

Akademisi, pada model integrasi Pentahelix ini berperan sebagai *conceptor*. Seperti misalnya melakukan standarisasi, menyiapkan konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi ancaman keamanan nonmiliter, melakukan kegiatan sosialisasi dan advokasi terhadap potensi yang ada di wilayah perbatasan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam hal ini pula, para akademis memiliki peran signifikan dalam mendukung gerakan dan kebijakan pemberdayaan masyarakat guna mengimplementasikan sosialisasi dan pengabdian yang secara langsung menguntungkan masyarakat karena dalam pemberdayaan, partisipasi masyarakat tidaklah cukup apabila tidak dibarengi dengan kontribusi para ahli yang memahami dampak positif dan negatif dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah salah satu contohnya adalah Pemahaman Bela Negara. (Indrawan & Efriza, 2018)

Bisnis, pada model integrasi Pentahelix ini berperan sebagai *enabler*. Aktor ini merupakan entitas yang melakukan penciptaan nilai tambah dan mengembangkan sumber daya alam wilayah perbatasan serta menyediakan segala sesuatu yang dapat membantu mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat terkait peningkatan ekonomi. Dalam konteks ini, diharapkan masyarakat mampu turut andil dalam proses pemasaran dan pengelolaan wilayah perbatasan dalam meningkatkan aspek perekonomian secara legal dan formal, menciptakan pelaku bisnis berbentuk UMKM sehingga masyarakat perbatasan mendapat manfaat dari adanya pasar, modal, prasarana teknologi dan koperasi sehingga potensi sumber daya perbatasan memiliki nilai tambah dan mampu mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pemerintah, pada model integrasi Pentahelix ini berperan sebagai regulator,

dimana pemerintah berperan sebagai pengatur sekaligus penanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat terutama pada menghadapi ancaman keamanan nonmiliter dan pembangunan wilayah perbatasan. Pemerintah adalah aspek yang penting dalam melibatkan semua jenis kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dimulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan, pengendalian, promosi, perizinan, alokasi anggaran, dan rancangan program pemberdayaan. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengkoordinasi semua *stakeholder* yang berkontribusi dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan dari ancaman keamanan nonmiliter.

Komunitas, pada model integrasi Pentahelix ini berperan sebagai *accelerator* dimana dalam hal ini komunitas merupakan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan sebagai motor penggerak percepatan implementasi pemberdayaan masyarakat. Unsur masyarakat merupakan salah satu aspek tercapainya tujuan kegiatan pemberdayaan, karena dalam pembangunan suatu wilayah harus dimulai dari pengembangan kualitas masyarakat yang menetap di wilayah tersebut.

Media Massa, pada model integrasi Pentahelix ini berperan sebagai *expenders*, dimana media berperan sebagai mendukung publikasi dalam menciptakan *brand image* yang baik. Keberadaan media sosial saat ini turut berpengaruh terhadap penyebaran informasi terkait permasalahan atau isu-isu terkini ancaman keamanan nonmiliter. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memantau perkembangan isu-isu tersebut. Sementara dalam dampak positif yang ada, media massa dapat dijadikan penyalur informasi dalam penggunaan teknologi, akses pasar yang dapat diterima oleh masyarakat pelaku UMKM

dalam mempromosikan komoditas lokal perbatasan dan mengembangkan usahanya.

Hasil pemberdayaan yang ingin dicapai adalah: 1) memperbesar kemampuan sumber daya dan peningkatan skala ekonomi kreatif yang dimiliki masyarakat perbatasan, 2) meningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengakses pasar, modal, kebijakan dan teknologi, 3) mengembangkan kemampuan koordinasi dan kerjasama kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya perbatasan dan ekonomi wilayah perbatasan, dan 4) memudahkan *controlling* terhadap penumbuhan ekonomi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga dari ancaman keamanan nonmiliter.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dilakukan sebagai upaya untuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter seperti ancaman keamanan, ekonomi, dan ideologi. Salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bentuk upaya pengembangan UMKM di Provinsi Riau ini dengan penyaluran dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di tahun 2021, jumlah penerima bantuan ini sebanyak 341.695 pelaku UMKM dengan nominal uang sebesar Rp.1,2 Juta per UMKM (Sumber, tahun). Pengembangan UMKM yang lebih terarah dan difokuskan ini memiliki tiga (3) tujuan, yaitu: 1) Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan UMKM agar terciptanya iklim dan lingkungan usaha yang kondusif. 2) Meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan dukungan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepada para pelaku UMKM. 3) Meningkatkan kemandirian para pelaku UMKM.

Pembinaan terhadap para pelaku UMKM perlu dikembangkan lagi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemasaran, penggunaan teknologi, dan peningkatan inovasi UMKM. Keberhasilan pengembangan UMKM tidak terlepas dari keikutsertaan berbagai pihak yang melakukan pembinaan baik berupa pelatihan yang bersifat teknis maupun non-teknis. Pengembangan UMKM ini juga merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam mencegah berbagai ancaman dari luar, jika kesejahteraan masyarakat mampu dipenuhi oleh Pemerintah maka akan menjaga kestabilan keadaan di dalam masyarakat.

## PENUTUP

Penggunaan integrasi model Pentahelix sebagai dasar kolaborasi dalam pengembangan, keamanan, dan perubahan sosial sangat memungkinkan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, perubahan sosial dapat memberikan dampak dan manfaat bagi publik, lingkungan internal dan eksternal serta pihak-pihak yang terlibat dalam integrasi Pentahelix itu sendiri.

Integrasi model Pentahelix dikawasan perbatasan melibatkan lima *stakeholder* dalam penerapannya, yaitu: akademisi, swasta, pemerintah, media, dan masyarakat. Penggunaan integrasi model Pentahelix ini termasuk kedalam bagian sistem pertahanan nirmiliter, dimana membangun pertahanan negara tanpa senjata melainkan menggunakan pembangunan nonfisik masyarakat yang ada di kawasan perbatasan. Setidaknya terdapat tiga permasalahan utama yang terjadi di kawasan perbatasan Provinsi Riau, yaitu: (1) ancaman keamanan: tingginya angka penyelundupan barang ilegal dari negara Malaysia. (2) ancaman ekonomi: rendahnya angka kesejahteraan masyarakat di perbatasan Provinsi Riau. (3) ancaman ideologi: masuknya pemahaman dari

negara tetangga yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat di perbatasan Provinsi Riau.

Implementasi model Pentahelix di Provinsi Riau sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memperdayakan masyarakat pada kawasan perbatasan dimana masih tingginya angka kejahatan transnasional, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan adanya ancaman perubahan ideologi di masyarakat. Pada Provinsi Riau pemberdayaan masyarakat lebih menggunakan pendekatan pada sektor UMKM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, dimana Pemerintah Daerah dengan serius memasukkan program pengembangan UMKM kedalam Rancangan APBD Provinsi Riau.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Terimakasih kepada Co-Author dan berbagai pihak yang membantu penulis dalam segi materil maupun nonmateril sehingga artikel ini terselesaikan dengan sebagaimana mestinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri, A., Setiawan, A., & Wahyudi, H. (2019). Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia. *Jurnal Global & Strategis*, 13(1), 103. <https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.103-122>
- Andayani, L., & Lidia, N. A. (2018). Social-Economic Condition Of Inter States Boundary Community Community Interstate Boundary Study In North Central-Timor. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 37–59.
- Hadiyanti, P. (2008). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 17(IX), 90–99. <https://doi.org/10.21009/pip.171.10>
- Hamid, H. (2018). Manajemen pemberdayaan masyarakat.
- Haris Zulkarnain, M., & Roisah, K. (2018). Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakannya di Perbatasan Indonesia Malaysia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 490. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p06>
- Hikam, M. A., & Praditya, Y. (2018). Globalisasi dan Pemetaan Kekuatan Strategis Pertahanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Transnasional: Berdasarkan Analisis Model Element of National Power. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 53–70. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.357>
- Indrawan, R. M. J., & Efriza, E. (2018). Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(2), 21–40. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i2.395>
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (2015). Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Implementasi REDD+ (Reducing Emission From Deforestation and Forest Degredation Plus) di Riau. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(2), 5–24.
- Lengkong, J., Rengkung, F., & Kaawoan. (2018). Pemetaan Potensi Gangguan Radikal Terorisme di Wilayah Kabupaten Taulad. 1–18.
- Lesnussa, J. U. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Negeri Halong Baguala Ambon. *Jurnal Sosio Sains*, 5(No, 2), 91–107. <http://journal.ildikti9.id/sosiosains>
- Lubis, R. R. (2018). Securitization of Maritime Security Issues in Supporting Indonesia'S Defense Diplomacy At Admm-Plus on Maritime Security. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i1.275>
- Rahayu, S., & Junior, J. J. (2021). Optimalisasi Kebijakan dalam Pengelolaan Perbatasan

- (Studi Kasus: Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9.
- Rani, F. (2017). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan. *Jurnal Transnasional*, 4(1), 1–17.
- Rusfiana, Y., & Madjid, U. (2017). Synergy of Local Government and Indonesian National Army in Establishing State Border Area (NKRI-RDTL). *Mimbar*, 33(2), 301–309.
- Sabaat, Y. Y. (2017). Penyelesaian Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste dalam Konteks Politik Tata Ruang. *Jurnal\_TP*, 1–12.
- Siregar, C. N., Rahmansyah, S., & Saepudin, E. (2019). Ancaman Keamanan Nasional di Wilayah Perbatasan Indonesia: Studi Kasus Pulau Sebatik dan Tawau (Indonesia-Malaysia). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 4(1).
- Swanström, N. (2010). Traditional and Non-Traditional Security Threats in Central Asia: Connecting the New and the Old. *China and Eurasia Forum Quarterly*, 8(2), 35–51.
- Syafira, M., & Fatima, K. (2021). Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter
- Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba Di Kalimantan Barat Untuk Pertahanan Negara Synergy Between the National Narcotics Agency and the. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi*, 4(1), 97–115. <https://www.antaraneews.com/berita/1908360/bnn-ungkap-88-jaringan-sindikata-narkotika->
- The Stanley, F. (2003). Nontraditional security threats in Southeast Asia. *Policy Bulletin*. <http://www.stanleyfoundation.org/publications/archive/spc03cpb.pdf>